



RENJA PERUBAHAN

BAPPEDA-LITBANG KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2025



BAPPEDA-LITBANG KABUPATEN BENGKULU SELATAN

2025



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
(BAPPEDA - LITBANG)**

JL. Affan Bachsin Telp/Fax. (0739) 21475 Manna 38515

Website : bappeda.bengkuluselatankab.go.id email : bappeda@bengkuluselatankab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA LITBANG
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR : 25 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA PERUBAHAN)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN
TAHUN 2025**

KEPALA BAPPEDA-LITBANG KABUPATEN BENGKULU SELATAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 13 Tahun 2025, Kepala Bappeda-Litbang menetapkan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Bappeda-Litbang Tahun 2025 sebagai dokumen perencanaan Bappeda-Litbang untuk periode 1 (satu) Tahun;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda- Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Darurat Nomor: 04 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 1955 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
2. Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4282);
3. Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4421);

4. Undang-undang Nomor : 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4438);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), Sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2005 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 03 tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023 Nomor 03);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 10 Tahun 2024 Tanggal 31 Desember 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
18. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 32 Tahun 2024 Tanggal 31 Desember 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2025.
19. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 Nomor 62);

Memperhatikan : Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan yang telah sesuai dengan RKPD Perubahan Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 13 Tahun 2025 untuk dijadikan Pedoman menyusun RKA.P/DPA.P Tahun Anggaran 2025 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan;
- KEDUA : Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan yang disahkan memuat rencana program, kegiatan beserta kebutuhan pendanaan pagu indikatif Tahun Anggaran 2025;
- KETIGA : Dalam pelaksanaan keputusan ini harus sesuai dan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MANNA

PADA TANGGAL : 26 Juni 2025



KEPALA,

Fikri Aljauhari, S.STP., M.M.
NIP-198210012001121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Kepala Bappeda-Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan.
3. Inspektur Kabupaten Bengkulu Selatan.
4. Masing-masing Kepala Bidang/Kabid/Kasubag di Lingkungan Bappeda-Litbang

BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN RANCANGAN RENCANA KERJA PERUBAHAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2025 ✓

Pada hari ini Selasa Tanggal Enam Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan telah diselenggarakan verifikasi rancangan rencana kerja perubahan perangkat daerah tahun 2025 Kabupaten Bengkulu Selatan yang dihadiri oleh :

1. *Kasubag perencanaan Bappeda Litbang*
2. Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan

Serta dilakukan pembahasan terhadap :

1. Rancangan rencana kerja perubahan perangkat daerah tahun 2025
2. Pagu indikatif program dan kegiatan perangkat daerah perubahan tahun 2025

Peserta verifikasi rancangan-rancangan kerja perubahan organisasi perangkat daerah tahun 2025,

Menyepakati :

- Kesatu : rencana kerja perubahan perangkat daerah tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran berita acara ini.
- Kedua : pagu indikatif rencana kerja perubahan perangkat daerah tahun 2025
- Ketiga : pagu indikatif program dan kegiatan pada lampiran berita acara ini merupakan bahan pertimbangan pada tahap pembahasan selanjutnya.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Manna, 6 Mei 2025
Kepala Bidang PPM
Bappeda Litbang Kabupaten
Bengkulu Selatan

Yemmi Fitriani
Yemmi Fitriani, ST, MSI
NIP. 19820125 200901 2 009

Kepala Bidang P2EPD
Bappeda Litbang Kabupaten
Bengkulu Selatan

Nusadian Esa Putra
Nusadian Esa Putra, ST, MET
NIP.19830703 200901 1 005

Lampiran Berita Acara
Hasil Kesepakatan Rancangan Rencana Kerja Perubahan
Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025

Hasil Verifikasi Rancangan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah tahun 2025 :

1. Program dan kegiatan pada Renja 2025 sudah termuat di Renstra 2021 - 2026.
2. Renja tahun 2025 tidak mengalami perubahan dan penambahan sub kegiatan hanya ada penambahan page pada sub kegiatan pada pengesahan 2025 :
 - Penyediaan bahan bacaan dan peralatan pos-u.u. ada penambahan 50.000.000 menjadi 57.500.000
 - Pengadaan Sarana dan prasarana gedung kantor 86.213.000 menjadi 493.713.000
 - Pemeliharaan gedung kantor 0 menjadi 350.000.000
 - Pengelolaan Data 41.000.000 menjadi 76.000.000
3. Tidak ada penambahan kegiatan dan sub kegiatan pada Renja 2025.



Kepala
Fikri Aljauhari, S.STP, M.M
NIP. 198210012001121002

Manna, 6 Mei 2025
Kepala Bidang PPM
Bappeda Litbang Kabupaten
Bengkulu Selatan

Yemmi Fitriani, ST, MSI
NIP. 198201252009012009

Kepala Bidang P2EPD
Bappeda Litbang Kabupaten
Bengkulu Selatan

Nusadian Esa Putra, ST, MET
NIP. 198307032009011005

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmannirrohiim,

Assalammu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas perkenanNya Rencana Kerja (Renja) Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 30 Tahun 2023, Bappeda-Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan mempunyai Tugas Pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan. Keberadaan Bappeda-Litbang sebagai *leading sector* perencanaan pembangunan di daerah, memiliki tugas dan fungsi pelayanan penyediaan rencana yang terarah, akurat dan terpadu, sehingga dapat menjamin kesinambungan pembangunan di daerah.

Dalam rangka memenuhi tugas pokok tersebut, serta sebagai upaya menciptakan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan, maka disusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Bappeda-Litbang Tahun 2025 sebagai langkah awal penyusunan perencanaan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi upaya kita dalam membangun Kabupaten Bengkulu Selatan yang kita cintai ini.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Manna, 26 Juni 2025
Kepala Bappeda-Litbang
Kabupaten Bengkulu Selatan



Fikri Aljahary, S.STP., M.M.
NIP.198210012001121002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i	
DAFTAR ISI	ii	
DAFTAR TABEL	iii	
BAB I PENDAHULUAN		
1.1 Latar Belakang.....	1	
1.2 Landasan Hukum	2	
1.3 Maksud dan Tujuan	5	
1.4 Sistematika Penulisan	7	
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA LITBANG		
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda-Litbang Tahun Lalu dan Pencapaian Renstra Bappeda-Litbang	9	
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda Litbang	15	
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda Litbang	22	
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	24	
2.5 Penelaah Usulan Program dan kegiatan masyarakat	37	
BAB III TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA LITBANG		
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	39	
3.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi	40	
3.3 Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda Litbang	41	
3.4 Program dan Kegiatan	49	
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDA LITBANG.....		57
BAB V PENUTUP		68

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024.....	11
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan.....	18
Tabel 2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025	25
Tabel 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026	49
Tabel 4.1. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025	56
Tabel 4.2. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang sesuai dengan tujuan yang dikehendaki, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan sebagai *leading sector* perencanaan pembangunan daerah mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan dapat berjalan secara partisipatif, koordinatif, sinergis dan komprehensif serta tersusun secara sistematis sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), menyatakan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Perencanaan pembangunan daerah sangat penting untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang merupakan representasi dan semangat otonomi daerah, mengharuskan pemerintah pusat menyerahkan sebagian kewenangannya kepada daerah dalam rangka desentralisasi.

Untuk dapat tercapainya kewajiban tersebut perlu adanya suatu perencanaan yang merupakan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan di daerah. Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan (Bappeda-Litbang) Tahun Anggaran 2025 ini memberi gambaran pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Bappeda-Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan dalam tahun 2025. Penyusunan Renja ini akan diselaraskan dengan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dengan mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan 2021-2026.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja Perubahan Bappeda-Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai bagian dari perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan rencana pembangunan nasional. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penyusunan Renja Perubahan Bappeda-Litbang didasarkan pada dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perencanaan, diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 03 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023 Nomor 3);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 08 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
17. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 73 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2024;
18. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Bappeda-litbang Kabupaten Bengkulu Selatan

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Bappeda-Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menggambarkan kondisi pembangunan yang ingin dicapai di lingkungan Bappeda-Litbang pada masa kepemimpinan awal kepala daerah dan kondisi yang diinginkan satu tahun kedepan dalam rangka mendorong pencapaian visi dan misi pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026.

Secara lebih spesifik, maksud disusun Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Bappeda-Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan, antara lain:

1. Sebagai tolak ukur untuk mengukur dan titik tolak melakukan evaluasi kinerja tahunan;
2. Sebagai acuan bagi seluruh jajaran staf Bappeda-Litbang dalam menentukan prioritas program dan kegiatan;
3. Memberikan gambaran tentang kondisi umum organisasi dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi organisasi sekaligus memberikan gambaran kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.

1.3.2 Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Bappeda-Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Bappeda-Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025 adalah untuk merumuskan dan menetapkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu satu tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda-Litbang dalam rangka membangun daerah dan sinkronisasi serta sinergitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sebagai upaya mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang efisien, efektif dan profesional guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan

daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026.

Secara lebih spesifik, tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Bappeda- Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan antara lain:

1. Menciptakan keterpaduan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai visi dan misi pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Bappeda-Litbang dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
3. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Bappeda-Litbang dalam memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan;
4. Memberikan pedoman pada pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda-Litbang Tahun 2025;
5. Sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) sehingga perencanaan lebih terarah dan terukur, tepat waktu dan tepat sasaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Bappeda-Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025 didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312), sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BAPPEDA-LITBANG

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2024
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda Litbang
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal SKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA LITBANG

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi
- 3.3 Tujuan dan Sasaran
- 3.4 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDA LITBANG

BAB. IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) BAPPEDA-LITBANG

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda-Litbang Tahun Lalu dan Pencapaian Renstra Bappeda-Litbang

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Bappeda-Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan disusun mengacu pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 yang merupakan dokumen perencanaan dimana didalamnya memuat tujuan, kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka mensukseskan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Litbang sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 25 Tahun 2011 tentang tugas pokok, fungsi dan tata kerja lembaga teknis daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Bappeda-Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki fungsi sebagai tolok ukur dari pencapaian visi, misi, tujuan dan program pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam urusan perencanaan pembangunan daerah. Untuk itu setiap program dan kegiatan yang dirumuskan harus mampu mengakomodasi dan mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan strategi pemerintah daerah terutama yang terkait dengan urusan perencanaan pembangunan. Program dan kegiatan beserta kebutuhan pendanaan indikatif perlu dirumuskan dengan berdasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di daerah dan

berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama satu tahun kedepan dengan memperhitungkan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama satu tahun kedepan dengan memperhitungkan kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*) dan ancaman (*treatment*) yang ada atau mungkin timbul dengan mengantisipasi perkembangan masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai dengan mengacu pada dokumen RPJMD.

Demi mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025 di Bappeda-Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan, pelaksanaannya dibiayai oleh APBD Kabupaten Bengkulu Selatan, perincian realisasi anggaran dana kegiatan pada tahun anggaran 2024 dapat dicermati pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Kode	Uraian/Bidang Uraian Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan				OPD Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	Tingkat Realisasi (%)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6 x100	9	10=(5+7+9)	11= 104*100	12	13										
	Uraian Pemerintahan Fungsi Penunjang																					
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN																					
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			81.964,160				81.964,160		87,000,000	46,306,750											
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 dokumen		9	51,480,000	9	50,400,500	100,00	100,00	9	51,83										
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	30,484,160	5	30,484,160	9	30,094,030	100,00	100,00	5	55,62										
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4,426,112,455		4,426,112,455		4,241,673,132		5,372,876,640	2,809,565,172											
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	672 orang/bulan	4,008,142,235	672	4,008,142,235	672	3,903,644,232	100,00	94,70	672	52,58										
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	400,880,000	12	400,880,000	12	357,000,000	100,00	99,61	12	50,00										
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	5 Laporan	17,290,220	5	17,290,220	4	8,129,000	100,00	99,47	1	39,32										
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			14,699,920		14,699,920		14,939,200														
	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	5 Laporan	14,699,920	5	14,699,920	5	14,939,200	100,00	99,08	5	25,56										
	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah			152,364,500		152,364,500		78,141,000		152,384,500												
	Pendidikan dan Pelatihan Administrasi Kepegawalan	Jumlah Dokumen Pendidikan dan Pengolahan Administrasi Kepegawasaan	48 dokumen	10,000,000	48	10,000,000	2	17,916,000	100,00	100,00	4	33,33										
	Pendidikan dan Pelatihan fungsional berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan	10 orang	142,364,500	10	142,364,500	12	60,225,000	100,00	99,55	4	44,65										
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			590,568,120		590,568,120		831,072,400		590,568,120	155,871,011											
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	11 Paket	19,439,000	11	19,439,000	12	19,439,900	100,00	100,00	4	55,26										
	Penyediaan Perlengkapan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Perlengkapan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	12 Paket	51,606,000	32	51,606,000	34	50,441,000	100,00	99,02	5	77,86										
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket/Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	723 Paket	79,737,400	723	79,737,400	12	97,273,800	100,00	99,71	65	52,47										
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket/Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	30000 Paket	29,416,720	30000	29,416,720	12	32,081,300	100,00	87,08	3	46,40										
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Yang Disediakan	6600 Dokumen	90,000,000	6600	90,000,000	7000	92,090,000	100,00	100,00	3,000	50,28										
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	265 Laporan	320,369,000	265	320,369,000	255	338,857,000	100,00	99,99	116	59,88										

	Pengelolaan Data Kelangkaan dan Peraturan	Jumlah Data Kelangkaan dan Peraturan Yang Tersedia Dengan Baik				2	151.000.000	2	142.562.924	100,00	99,37	1	127.000.000	0,5	44.875.305	50,00	35,33	Bappeda Litbang
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		85.000.000				85.000.000		131.995.348				85.000.000		26.870.572			
	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	85.000.000		1	1	85.000.000	4	131.995.348	100,00	98,99	1	170.000.000	0,4	56.738.691	40,00	34,55	Bappeda Litbang
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi		143.000.000				143.000.000		219.891.959				143.000.000		15.636.500			
	Penelitian, Pengembangan dan Perakayasaan d Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perakayasaan d Bidang Teknologi dan Inovasi	118.000.000		1	1	118.000.000	1	160.445.750	100,00	99,87	1	118.000.000	02	15.636.600	20,00	13,25	
	Sosialisasi dan Duenisasi hasil-hasil Kelangkaan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Duenisasi Hasil-hasil Kelangkaan	25.000.000		1	1	25.000.000	1	50.236.200	100,00	74,59	0		0	0	0	0	Bappeda Litbang
	Facilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Facilitasi Hak Kekayaan Intelektual	80.000.000		0	0	0	0	0	0	0	1	80.000.000	0,5	49.298.998	50,00	61,62	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda

Capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan sampai dengan Tahun 2024 ditunjukkan melalui jumlah perencanaan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Dokumen perencanaan dan penelitian pada prinsipnya menggambarkan kualitas proses perencanaan pembangunan yang semakin meningkat selama dua tahun terakhir. Beberapa indikator peningkatan tersebut antara lain:

1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Hal ini dapat dilihat pada kegiatan Musrenbang di tingkat Desa/Kelurahan. Kecamatan, forum OPD dan Musrenbang Kabupaten;
2. Meningkatnya keselarasan dan sinkronisasi antara dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
3. Meningkatnya efektifitas produk-produk pengembangan dan penelitian berupa hasil kajian dan analisis yang lebih komprehensif.

Dalam peningkatan kualitas proses perencanaan tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Adapun tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bappeda Litbang antara lain:

1. Munculnya berbagai kebijakan Nasional dan kebijakan pengambil keputusan di daerah yang berdampak pada perubahan kebijakan daerah secara mendadak sehingga

menyebabkan inkonsistensi perencanaan pembangunan di daerah;

2. Adanya perubahan dalam susunan tata organisasi nomenklatur daerah yang mengakibatkan berkembangnya fungsi Bappeda-Litbang dengan susunan kepegawaian yang berubah pula. Kondisi ini menyebabkan budaya organisasi harus disusun ulang sehingga tugas-tugas berdasarkan struktur organisasi yang baru harus dapat di kelola sebaik mungkin;
3. Ada pertentangan/ketidaksesuaian antara peraturan perundangan yang mengatur sistem perencanaan pembangunan dengan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan sehingga berdampak terhadap mekanisme perencanaan pembangunan daerah;
4. Belum optimalnya hasil perencanaan pembangunan karena masih terdapat tumpang tindih perencanaan yang dilakukan oleh Badan/Dinas/Kantor;
5. Kurangnya keterbukaan dan kemudahan akses informasi untuk kepentingan perencanaan pembangunan dari instansi yang berkompeten;
6. Perubahan paradigma perencanaan pembangunan yang menuntut perencanaan sebagai fasilitator dan mediator dan mengakomodir aspirasi masyarakat;

7. Belum optimalnya kegiatan evaluasi pelaksanaan pembangunan dalam memberikan kontribusi terhadap penyusunan kegiatan perencanaan selanjutnya;
8. Persentase dukungan pemerintah pusat dan propinsi terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan di daerah belum optimal;
9. Terbukanya kesempatan yang luas bagi peningkatan mutu sumber daya manusia melalui penyelenggaraan/pengiriman untuk menempuh pendidikan maupun pelatihan gelar maupun non gelar;
10. Adanya peningkatan peran dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan;
11. Adanya ketersediaan dan kesanggupan perguruan tinggi dan lembaga lainnya untuk terlibat sebagai mitra kerja dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
12. Pengembangan wilayah yang pesat akibat pengaruh pelaksanaan pembangunan.

Secara detail, analisis pencapaian kinerja pelayanan Bappeda Litbang dapat dicermati pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda-Litbang
Kabupaten Bengkulu Selatan

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Bappeda Litbang				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2025	Tahun 2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%		19,999,900	19,999,900	5,000,000	5,000,000	7,675,300	50,400,500	55,000,000	55,000,000		
2	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100%		20,000,000	20,000,000	15,000,000	15,000,000	11,001,200		0	0		
3	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100%		20,000,000	20,000,000	10,000,000	10,000,000	12,177,800		0	0		
4	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100%		20,000,000	20,000,000	15,000,000	15,000,000	10,485,800		0	0		
5	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100%		199,999,900	199,999,900	10,000,000	10,000,000	11,093,100		0	0		
6	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%		20,000,400	20,000,400	30,000,000	30,000,000	32,567,400	30,094,030	32,000,000	32,000,000		
7	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%		3,911,642,845	3,911,642,845	4,063,381,675	4,063,381,675	3,903,644,232	4,399,900,262	4,008,142,235	4,208,549,347		
8	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%		396,000,000	396,000,000	300,910,090	315,071,090	357,000,000	423,180,000	450,480,000	506,880,000		
9	Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	100%		10,000,000	10,000,000	21,533,200	21,533,200	8,129,000	17,463,620	79,290,220	18,154,731		
10	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	100%		15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	14,939,200	15,193,620	14,999,920	15,749,916		
11	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100%		14,999,900	14,999,900	10,000,000	10,000,000	17,916,000	10,993,010	10,000,000	10,500,000		
12	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100%		-		49,500,000	49,500,000	60,225,000	119,308,900	65,000,000	149,482,725		
13	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	100%		19,444,000	19,444,000	19,439,300	19,439,300	19,439,300	19,434,000	19,439,000	20,410,950		
14	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	100%		46,705,000	46,705,000	46,205,000	46,205,000	50,441,000	54,483,400	51,606,000	54,186,300		
15	Jumah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	100%		100,029,100	100,029,100	77,560,000	77,560,000	97,273,800	79,584,600	79,737,400	83,724,270		
16	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan	100%		30,089,100	30,089,100	30,000,000	30,000,000	32,061,300	26,364,720	29,416,720	30,887,556		

17	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Yang Disediakan	100%		100,850,000	100,850,000	90,000,000	90,000,000	93,000,000	90,000,000	90,000,000	94,500,000	
18	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%		245,061,000	245,061,000	108,925,000	218,925,000	338,857,000	448,144,311	320,369,000	336,387,450	
19	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan Lainnya Yang Disediakan	100%		0	0	0	0	0	487,091,300	24,000,000	52,500,000	
20	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	100%		-		43,453,000	63,453,000	210,724,800	271,409,820	29,765,560	50,000,000	
21	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%		263,139,275	263,139,275	182,424,235	182,424,235	235,389,254	256,472,965	236,361,645	248,058,043	
22	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%		24,000,000	24,000,000	24,000,000	24,000,000	24,000,000		0	0	
23	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	100%		100,000,000	100,000,000	96,720,500	96,720,500	235,389,251	156,225,600	160,139,500	168,146,265	
24	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%				30,000,000	30,000,000	47,731,000	55,178,000	38,178,000	40,086,900	
25	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya Yang	100%		20,000,000	20,000,000	20,080,000	20,080,000	33,704,000	19,510,000	19,510,000	20,485,500	
26	Jumlah Berita Acara Musrenwang Kabupaten/Kota	100%		55,000,000	55,000,000	55,000,000	55,000,000	90,830,600	92,408,600	83,000,000	80,000,000	
27	Jumlah Dokumen Perencanaan Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPMD/RKPD)	100%		290,000,000	290,000,000	147,000,000	147,000,000	191,983,424	373,954,250	400,000,000	405,000,000	
28	Jumlah Masukan Hasil Analisis Data Untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	100%		60,000,000	60,000,000	52,000,000	52,000,000	122,216,654	181,180,791	150,000,000	155,000,000	
29	Jumlah Orang yang Dibina Dalam Pemanfaatan data dan Informasi	100%		90,000,000	90,000,000	50,000,000	50,000,000	111,277,900		0	0	
30	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah Yang Diterbitkan	100%				40,000,000	40,000,000	-		0	0	
31	Jumlah Laporan hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	100%		90,000,000	90,000,000	80,000,000	80,000,000	131,842,982	119,866,464	85,000,000	90,000,000	
32	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	100%		65,000,000	65,000,000	70,000,000	70,000,000	91,605,187	182,915,600	80,000,000	85,000,000	
33	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	100%				40,000,000	40,000,000	-	151,684,194	115,000,000	120,000,000	
34	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	100%		58,535,200	58,535,200	56,921,612	57,577,157	114,251,976	141,464,655	120,000,000	125,000,000	

35	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD Pada Bidang Pemerintahan	100%	81,463,840	81,463,840	82,143,116	83,032,006	65,086,699	78.337.208	80.000.000	85.000.000
36	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	100%	50,000,000	50,000,000	47,532,891	48,421,783	84,819,674	98783.900	75.000.000	80.000.000
37	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja bidang pembangunan manusia	100%	60,000,000	60,000,000	58,532,892	59,371,783	89,875,800	74.876.330	75.000.000	80.000.000
38	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja bidang pembangunan manusia	100%	110,910,290	110,910,290	114,534,211	115,423,102	96,026,400	145.337.511	150.000.000	155.000.000
39	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/RPJMD dengan RKPD/RPJMD Pada Bidang Pembangunan Manusia	100%	138,911,260	138,911,260	145,335,278	146,224,169	137,017,154	141.563.624	100.000.000	105.000.000
40	Jumlah Perangkat Daerah Yang Mendapatkan Asistensi Dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	100%			35,000,000	35,000,000	-	0	60,000,000	70,000,000
41	Jumlah Perangkat Daerah Yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi Dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	100%	96,000,000	70,000,000	35,000,000	35,000,000	184,875,050	47.548.900	50,000,000	55,000,000
42	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD Pada Bidang Perekonomian	100%			35,000,000	40,050,000	-	138.700.484	110,000,000	130,000,000
43	Jumlah Perangkat Daerah Yang Mendapatkan Asistensi Dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	100%	96,000,000	96,000,000	75,000,000	75,000,000	316,486,824	132.429.500	70,000,000	70,000,000
44	Jumlah Perangkat Daerah Yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi Dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	100%			50,000,000	50,000,000	-	44.210.700	70,000,000	85,000,000
45	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD Pada Bidang SDA	100%			75,000,000	75,000,000	-	120.180.150	85,000,000	85,000,000
46	Jumlah Perangkat Daerah Yang Mendapatkan Asistensi Dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	100%			50,000,000	50,000,000	-	0	99,000,000	100,000,000
47	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	100%			60,000,000	60,000,000	344,919,655	38.439.050	30,000,000	35,000,000

48	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD Pada Bidang Infrastruktur	100%		150,000,000	190,000,000	90,000,000	90,000,000	-	250,869,438	161,000,000	170,000,000	
49	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan Yang Terkelola Dengan Baik	100%		115,000,000	115,000,000	80,000,000	80,000,000	142,592,924	185,817,974	60,000,000	115,000,000	
50	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	100%		0	0	0	0	0	0	0	0	
51	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	100%		105,000,000	105,000,000	80,000,000	80,000,000	131,995,348	119,743,777	60,000,000	115,000,000	
52	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	100%		130,000,000	130,000,000	50,000,000	50,000,000	160,445,750	153,068,262	160,000,000	175,000,000	
53	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Desiminasi Hasil-hasil Kelitbangan	100%			35,000,000	60,000,000	60,000,000	50,236,200	33,061,500	0	0	
54	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual	100%		0	0	0	0	0	0	60,000,000	115,000,000	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda-Litbang

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Bappeda-Litbang sebagai *leading sector* perencanaan pembangunan di daerah memiliki tugas dan fungsi pelayanan dan penyediaan rencana yang terarah, akurat dan terpadu sehingga menjamin kesinambungan pembangunan di daerah.

Dalam rangka upaya menciptakan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, maka peningkatan kualitas Bappeda-Litbang sebagai lembaga perencana daerah harus terus dipacu dan ditingkatkan. Dengan demikian melalui analisa terhadap isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi, dapat ditarik beberapa isu strategis yang menjadi tantangan Bappeda-Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan, antara lain:

1. Peningkatan kualitas dan kapabilitas tenaga teknis perencanaan, penelitian dan pengkajian pembangunan daerah;
2. Penyediaan data-data pembangunan yang tersusun secara sistematis, akurat dan akuntabel sehingga perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan dapat tercapai;

3. Penyusunan rencana pembangunan wajib memperhatikan dan mempedomani dokumen-dokumen perencanaan daerah;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan secara profesional dan transparan;
5. Peningkatan kualitas SDM yang terdidik secara profesional dalam mengembangkan kreatifitas, menalarkan ide dalam membaca konsep rencana pembangunan yang ingin dicapai serta memformulasikan kedalam rencana yang aplikatif;
6. Tingginya dukungan teknologi informasi yang memadai baik dari sisi infrastruktur maupun pengolahannya dalam bentuk website sebagai media informasi perencanaan pembangunan daerah;
7. Peningkatan kebersamaan dalam segala hal sebagai upaya mencapai visi bersama dalam memenuhi tugas dan panggilan;
8. Kajian tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis sebagai upaya menjamin pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada pelestarian sumber daya alam.

Mengacu pada visi dan misi serta program kepala daerah, dapat diidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dan permasalahan pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda-Litbang antara lain:

1. Belum memadainya tenaga teknis perencanaan.
2. Belum tersedianya data pembangunan yang akurat dan lengkap.
3. Belum dipedomaninya dokumen perencanaan.
4. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pembangunan.

5. Kurangnya dukungan teknologi informasi.

Strategi dan kebijakan disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD, strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Bappeda-Litbang mencapai tujuan dan sasaran yang efektif dan efisien.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan, kedudukan RKPD menjadi penting untuk menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang selanjutnya sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan umum anggaran atau plafon anggaran.

Kegiatan Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda-Litbang Tahun 2025 serta pencapaian kinerja Renstra Bappeda-Litbang ditujukan guna mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Bappeda-Litbang dalam melaksanakan program dan kegiatannya serta mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renja beserta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review tersebut dapat dicermati pada tabel 2.3 berikut :

TABRI 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025

NO	KODE	URISAN / BIDANG URISAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH			12	13	14	
1	2	3	1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
5	5.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																
		UNSUB PENUNJANG URISAN																
		PERENCANAAN																
1.	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URISAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-	-	8,001,635,000.00	-	-	-	-	-	-	8,850,689,953.00	9,070,689,953.00	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	
1.	5.01.01.2.01	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Kinerja (Pengelolaan Daerah)	-	-	-	-	-	87,000,000.00	-	-	-	-	-	-	87,000,000.00	87,000,000.00		PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA
1.	5.01.01.2.01.001	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Kinerja (Pengelolaan Daerah)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	-	-	-	55,000,000.00	Berkas, Buletin, Laporan, Surat, dan Buletin	DANA TRANSFER UMUM DANA LOKASI DANA	-	-	-	-	55,000,000.00	55,000,000.00		PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA
1.	5.01.01.2.01.002	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	-	-	-	20,000,000.00	Berkas, Buletin, Laporan, Surat, dan Buletin	DANA TRANSFER UMUM DANA LOKASI DANA	-	-	-	-	20,000,000.00	20,000,000.00	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	
1.	5.01.01.2.02	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Kinerja (Pengelolaan Daerah)	-	-	-	-	-	4,470,112,452.00	-	-	-	-	-	-	4,720,000,000.00	4,720,000,000.00	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	
1.	5.01.01.2.02.001	Pengelolaan Kebijakan dan Peraturan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	

5.01.01.2.05.000	Administrasi Keresnahan Persekitaran	-	-	-	-	-	75.000.000.00	-	-	-	1. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan Transformasi di Tata Kelola Pemerintahan dan Inovasi Publik Berbasis Teknologi Informasi	-	130.000.725.000.00	KADAN PERNYATAAN PERUBAHAN RENCANA PENGEMBANGAN
5.01.01.2.05.000	Prosedur dan Pengelolaan Administrasi Keresnahan	-	-	-	-	-	10.000.000.000.00	-	-	-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan Transformasi di Tata Kelola Pemerintahan dan Inovasi Publik Berbasis Teknologi Informasi	-	10.000.000.000.00	KADAN PERNYATAAN PERUBAHAN RENCANA PENGEMBANGAN
5.01.01.2.05.000	Jumlah Dokumen Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Menghadapi Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	-	-	65.000.000.000.00	-	-	-	1. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan Transformasi di Tata Kelola Pemerintahan dan Inovasi Publik Berbasis Teknologi Informasi	-	130.000.725.000.00	KADAN PERNYATAAN PERUBAHAN RENCANA PENGEMBANGAN
5.01.01.2.05.000	Administrasi dan Pengolahan	-	-	-	-	-	500.000.120.00	-	-	-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan Transformasi di Tata Kelola Pemerintahan dan Inovasi Publik Berbasis Teknologi Informasi	-	130.000.725.000.00	KADAN PERNYATAAN PERUBAHAN RENCANA PENGEMBANGAN
5.01.01.2.06.000	Prosedur dan Pengelolaan Administrasi Keresnahan	-	-	-	-	-	12.000.000.000.00	-	-	-	1. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan Transformasi di Tata Kelola Pemerintahan dan Inovasi Publik Berbasis Teknologi Informasi	-	130.000.725.000.00	KADAN PERNYATAAN PERUBAHAN RENCANA PENGEMBANGAN
5.01.01.2.06.000	Jumlah Paket Komponen Indikator Lintas/Penerangan Bangunan Kantor yang Dihasilkan	-	-	-	-	-	12.000.000.000.00	-	-	-	1. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan Transformasi di Tata Kelola Pemerintahan dan Inovasi Publik Berbasis Teknologi Informasi	-	130.000.725.000.00	KADAN PERNYATAAN PERUBAHAN RENCANA PENGEMBANGAN
5.01.01.2.06.000	Prosedur dan Pengelolaan Administrasi Keresnahan	-	-	-	-	-	12.000.000.000.00	-	-	-	1. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan Transformasi di Tata Kelola Pemerintahan dan Inovasi Publik Berbasis Teknologi Informasi	-	130.000.725.000.00	KADAN PERNYATAAN PERUBAHAN RENCANA PENGEMBANGAN

[illegible]

5.01.01.2.07	Pengelolaan Bina Milik Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul	-	-	-	35.765.000,00	-	-	-	1. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	102.300.000,00	DAFTAR PENCANTUMAN PERALIHAN DAFTAR PENCANTUMAN
5.01.01.2.07.0001	Pengelolaan Kegiatan Perencanaan Pemasaran Dinas Kabupaten Bantul	-	-	-	24.000.000,00	-	-	-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	52.300.000,00	DAFTAR PENCANTUMAN PERALIHAN DAFTAR PENCANTUMAN
5.01.01.2.07.0010	Pengelolaan Kegiatan Perencanaan Pemasaran Dinas Kabupaten Bantul	-	-	-	29.705.000,00	-	-	-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	20.000.000,00	DAFTAR PENCANTUMAN PERALIHAN DAFTAR PENCANTUMAN
5.01.01.2.08	Pengelolaan Jasa Konstruksi dan Jasa Lainnya	-	-	-	230.301.645,00	-	-	-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	248.000.000,00	DAFTAR PENCANTUMAN PERALIHAN DAFTAR PENCANTUMAN
5.01.01.2.08.0002	Pengelolaan Jasa Konstruksi dan Jasa Lainnya	-	-	-	230.301.645,00	-	-	-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	248.000.000,00	DAFTAR PENCANTUMAN PERALIHAN DAFTAR PENCANTUMAN
5.01.01.2.08.0002.001	Pengelolaan Jasa Konstruksi dan Jasa Lainnya	-	-	-	230.301.645,00	-	-	-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	248.000.000,00	DAFTAR PENCANTUMAN PERALIHAN DAFTAR PENCANTUMAN

2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan Rencana Kerja Bappeda Litbang didiskusikan dalam Forum SKPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan.

Pada forum SKPD tidak ada usulan Program/Kegiatan yang ditujukan kepada Bappeda Litbang selaku SKPD baik selaku dari Kelompok Masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi dan SKPD Kabupaten. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan hanya bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan Program/Kegiatan yang direncanakan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA-LITBANG

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Strategi dan kebijakan disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana BAPPEDA-LITBANG mencapai tujuan dan sasaran yang efektif dan efisien.

Strategi dan Arah Kebijakan BAPPEDA-LITBANG Kabupaten Bengkulu Selatan

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran sektoral, lintas sektoral dan wilayah, dan antara pusat dan daerah;serta keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penggaran, pelaksanaan dan pengawasan	- Penguatan kelembagaann perencanaan pembangunan nasional melalui penataan system perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;pengembangan system dan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan nasional;serta peningkatan kualitas koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
2. Meningkatkan kualitas pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional	- Penerapan perencanaan pembangunan nasional dan penggaran yang berbasis kinerja
3. Meningkatkan kualitas evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional	- Peningkatan kualitas hasil evaluasi kebijakan/kajian sebagai masukan bagi perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan penyelesaian permasalahan pembangunan

4. Meningkatkan kualitas kajian dan atau evaluasi kebijakan pembangunan	- Peningkatan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan
5. Meningkatkan kualitas koordinasi kebijakan pembangunan nasional	- Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja (better performance) lembaga dan pegawai

3.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi

Arah Kebijakan Pembangunan Nasional sebagaimana tersebut diatas kemudian dipertegas melalui arah kebijakan Provinsi agar perencanaan program/kegiatan yang akan diimplemetasikan pada tahun 2025 dapat selaras antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Arah kebijakan Provinsi dalam keterkaitan program dengan proritas nasional menyasar pada tujuan/sasaran dalam program prioritas, yang memuat poin-poin sebagai berikut :

1. Program prioritas pengentasan kemiskinan, revolusi mental, pembangunan kebudayaan dan prestasi bangsa;
2. Program prioritas peningkatan konektivitas multimoda dan antarmoda mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan infrastruktur perkotaan dan transformasi digital;
3. Penguatan kewirausahaan dan UKM, peningkatan nilai tambah dan investasi di sector riil dan industrialisasi, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja;
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, penguatan ketahanan bencana, pemenuhan kebutuhan energy dengan mengutamakan peningkatan EBT;
5. Penanggulangan terorisme, peningkatan keamanan siber, dan penguatan keamanan laut, penanggulangan narkoba dan penguatan Kamtibmas.

3.3 Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda Litbang

Tujuan dan sasaran Renja Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025 didasarkan pada perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Rencana Strategis Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan.

Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tujuan

1. Meningkatnya kualitas perencanaan dan Pengukuran Kinerja.
2. Mewujudkan capaian kapasitas Inovasi Daerah

Sasaran

1. Meningkatnya kualitas Perencanaan Kinerja
2. Meningkatnya kualitas Pengukuran Kinerja
3. Meningkatnya capaian kapasitas Inovasi Daerah

Berdasarkan atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2024, yang merekomendasikan untuk melakukan perbaikan dokumen perencanaan kinerja sehingga rumusan hasil (tujuan/sasaran strategis) secara jelas menggambarkan kondisi kerja yang akan dicapai organisasi, dimana untuk dokumen perencanaan sebelumnya dalam menetapkan Tujuan/sasaran strategis dianggap belum menggambarkan secara keseluruhan tugas pokok dan fungsi dari Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan.

Tindak lanjut yang dilakukan adalah dengan merumuskan kembali tujuan/sasaran strategis Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Keputusan Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penetapan Perubahan Indekator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan.

Berikut Tujuan dan sasaran strategis Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025 :

Tujuan

1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Meningkatnya kualitas hasil kelitbangan.

Sasaran

1. Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas
2. Meningkatnya capaian kapasitas inovasi daerah

Tujuan dan sasaran Bappeda-Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

**TUJUAN DAN SASARAN RENJA
BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tahun 2025
1.	1. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja 2. Meningkatnya kualitas Hasil Kelitbangan	1. Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas 2. Meningkatnya capaian kapasitas inovasi daerah	1. Persentase Sinergi Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah dengan rencana Kerja Pemerintah 2. Persentase kualitas Perencanaan 3. Persentase Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja 4. Indeks Inovasi Daerah	85,00 87,00 100 65,01
		1. Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	1. Nilai AKIP	76,00
		1. Optimalnya ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100
		1. Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah 2. Terlaksananya Evaluasi	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Jumlah Laporan	9 Dokumen

		Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan
		2. Optimalnya ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2. Persentase ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100
		1. Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN 2. Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3. Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 2. Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	672 Orang 12 Dokumen 12 Laporan
		3. Optimalnya ketersediaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	3. Persentase ketersediaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	100
		1. Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan
		4. Optimalnya ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4. Persentase ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
		1. Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 2. Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1. Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Dokumen 10 Orang
		5. Optimalnya ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5. Persentase ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100
		1. Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Paket 13 Paket

		3. Tersedianya Bahan Logistik Kantor 4. Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 5. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 6. Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	yang Disediakan 3. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4. Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5. Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65 Paket 10 Paket 8.000 Eksmplar 255 Laporan
		6. Optimalnya Pengadaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	6. Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100
		1. Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1. Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 2. Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 10 Unit
		7. Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7. Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100
		1. Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan
		8. Optimalnya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8. Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100
		1. Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2. Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	23 Unit 1 Unit

		Bangunan Lainnya 3. Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dipelihara/Direhabilitasi 3. Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	32 Unit
		2. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Kinerja	2. Nilai Perencanaan Kinerja	25,00
		1. Meningkatnya Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	1. Persentase Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	94,00
		1. Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota 2. Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota 2. Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	1 Berita Acara 3 Dokumen
		2. Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan	2. Persentase Updating Data dan Informasi Pembangunan Daerah	90,00
		1. Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	1. Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	200 Orang
		2. Meningkatnya Kualitas Pengukuran Kinerja	2. Nilai Pengukuran Kinerja	23,00
		1. Meningkatnya kualitas Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Persentase Pencapaian Indikator Kinerja Daerah	59,09
		1. Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota 2. Tersusunnya Laporan	1. Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 2. Jumlah Laporan Hasil	1 Laporan 4 Laporan

		Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	
		2. Optimalisasi Implementasi SIPD di Bidang Pembangunan Daerah	2. Persentase Implementasi SIPD di Bidang Pembangunan Daerah	100
		1. Terlaksananya Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1. Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	
		3. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Nilai Kualitas Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	51,00
		1. Optimalisasi kesesuaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada DokRen (RPJMD-RKPD, Renstra-Renja, Renja-RKA) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1. Persentase Konsistensi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	89,50
		1. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1. Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2 Laporan
		2. Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	2. Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Lapran
		3. Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3. Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen

		4. Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4. Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	24 Perangkat Daerah
		5. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5. Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	37 Perangkat Daerah
		6. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	6. Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	37 Perangkat Daerah
		3. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	2. Nilai Kualitas Perencanaan Bidang Perekonomian & SDA	51,00
		1. Optimalisasi kesesuaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada DokRen (RPJMD-RKPD, Renstra-Renja, Renja-RKA) Bidang Perekonomian dan SDA	1. Persentase Konsistensi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	87,15
		1. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1. Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	8 Perangkat Daerah
		2. Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	2. Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan
		3. Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun	3. Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi	15 Perangkat Daerah

		Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 4. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 5. Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA 4. Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA 5. Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	8 Perangkat Daerah 1 Laporan
		3. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	3. Nilai Kualitas Perencanaan Bidang Infrastruktur	51,00
		1. Optimalisasi kesesuaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada DokRen (RPJMD-RKPD, Renstra-Renja, Renja-RKA) Bidang Infrastruktur	1. Persentase Konsistensi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur	93,85
		1. Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 2. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 3. Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1. Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur 2. Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur 3. Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	8 Perangkat Daerah 8 Perangkat Daerah 1 Laporan
		4. Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan	1. Persentase Penelitian yang Dimanfaatkan untuk Perumusan Kebijakan Pembangunan	47,45

		1. Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1. Persentase Penelitian Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dikembangkan	10.00
		1. Terkelolanya Data Kelitbangan dan Peraturan	1. Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan
		1. Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	1. Persentase Penelitian Bidang Sosisl dan Kependudukan yang dikembangkan	15,00
		1. Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1. Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen
		2. Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	2. Persentase Penelitian Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang dikembangkan	10.00
		4. Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan	2. Persentase Peningkatan Indeks Inovasi Daerah	1.50
		1. Meningkatnya Inovasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1. Persentase pertumbuhan Inovasi setiap tahun	18.00
		1. Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 2. Terlaksananya Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1. Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 2. Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Dokumen 1 Laporan

3.4 Program dan Kegiatan

Rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2025 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 Dokumen	55.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	9 Dokumen	55.000.000
5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 laporan	32.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 laporan	32.000.000
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	672 orang/bulan	4,008,142,235	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	672 orang/bulan	4,208,549,347
5.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	450,480,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	506.880,000
5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Laporan	79.290.220	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Laporan	18.154.731
5.01.01.2.0.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							
5.01.01.2.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	14.999.920	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Laporan	15,749,916
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							

5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	265 Laporan	320,369,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	255 Laporan	336,387,450
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah							
5.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan Yang Disediakan	Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 unit	24,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 unit	52,500,000
5.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 unit	29,765,560	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 unit	50,000,000
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Umum Pemerintahan Daerah							
5.01.01.2.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	236,361,845	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	248,058,043
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Unit	160,139,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Unit	188,146,265
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	38,178,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Unit	40,086,900
5.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52 Unit	19,510,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	52 Unit	20,485,500

5.01.02.201 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan									
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Berita Acara	85.000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Berita Acara	90.000,000	
5.01.02.2.01.07	Koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kota yang Ditetapkan (RPJPD RPJMD/RKPD)	Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	400.000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Dokumen	405.000,000	
5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah									
5.01.02.2.01.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina Dalam Pemanfaatan data dan Informasi	Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200 Orang	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	200 Orang	155.000,000	
5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah									
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Kota	Jumlah Laporan hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	85,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	90,000,000	
5.01.02.2.03.03	Monitoring Evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan	80,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	85,000,000	
5.01.02.2.04 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah									
5.01.02.2.04.01	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	115,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	120,000,000	
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia								

5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	120.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Laporan	125.000.000
5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan harmonisasi Perencanaan pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD Pada Bidang Pemerintahan	Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	80.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	85.000.000
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	80.000.000
5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Laporan	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8 Laporan	80.000.000
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	155.000.000
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan harmonisasi Perencanaan pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/RPJMD dengan RKPD/RPJMD Pada Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	105.000.000
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	60.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	70.000.000
5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	60.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	70.000.000

5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian	Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	55,000,000
5.01.03.2.02.04	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD Pada Bidang Perekonomian	Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	110,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	130,000,000
5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah Yang Mendapatkan Asistensi Dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan	70,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	70,000,000
5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah Yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi Dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan	70,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	85,000,000
5.01.03.2.02.08	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD Pada Bidang SDA	Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	85,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	85,000,000
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan							
5.01.03.2.03.02	Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah Yang Mendapatkan Asistensi Dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	99,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	100,000,000
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Semua Kab.Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	35,000,000

5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	161,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	170,000,000
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan							
5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelibangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelibangan dan Peraturan Yang Terkelola Dengan Baik	Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	115,000,000
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan							
5.05.02.2.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	0
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan							
5.05.02.2.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	115,000,000
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi							
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	160,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	1 Laporan	175,000,000
5.05.02.2.04.04	Facilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual	Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	115,000,000
TOTAL					8,341,635,000			9,070,689,953

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KAB. BENGKULU SELATAN
TAHUN 2025

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URAIAN / BIDANG URAIAN / PROGRAM/ URAIAN / KEGIATAN	TARGET PERIODE REVISI Q4	REALISASI TAMBAH TAMBAH TAMBAH	PRAKTIKUM TAMBAH TAMBAH TAMBAH	PACU INDIKATIF (Rp)					KELOMPOK SUSUNAN			PRAKTIKUM TAMBAH			PERINGKAT DARI JAWAB			
						SEBELUM	SEKELAH	REVISI	REVISI	REVISI	LOKASI	SUMBER DATA	MAKSIKAL	DAERAH	TARGET	PACU INDIKATIF (Rp)				
1	5.01.02.2.01	Pengembangan dan Peningkatan Peningkatan Peningkatan	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	5.01.02.2.02	Pengembangan dan Peningkatan Peningkatan Peningkatan	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3	5.01.02.2.03	Pengembangan dan Peningkatan Peningkatan Peningkatan	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4	5.01.02.2.04	Pengembangan dan Peningkatan Peningkatan Peningkatan	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5	5.01.02.2.05	Pengembangan dan Peningkatan Peningkatan Peningkatan	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana kerja dan pendanaan Tahun 2025 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah. Adapun rincian program kegiatan yang akan dilaksanakan Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
I	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38.500.000
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.656.000
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
1	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	6.272.513.540
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	412.880.000
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	12.103.000
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.253.000
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	8.400.000
2	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional berdasarkan tugas dan fungsi	42.355.000
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	13.615.000
2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	51.606.000
3	Penyediaan bahan logistik kantor	72.204.000
4	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	21.000.000
5	Penyediaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50.000.000
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	198.050.000
VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintah Daerah	
1	Pengadaan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas	0

	jabatan	
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	86.213.000
VII	Penyediaan Jasa Penunjang Umum Pemerintahan Daerah	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	246.193.160
VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	252.418.000
2	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	0
3	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	23.770.000
IX	Penyusunan dan Perencanaan Penganggaran	
1	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	66.000.000
2	Koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota	256.554.000
X	Analisis Data Dan Informasi Pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
1	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	78.000.000
XI	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	44.145.000
2	Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	52.289.000
XII	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
1	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	76.000.000
XIII	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
1	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	72.078.000
2	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	42.533.000
3	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	46.804.000
4	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	47.152.000
5	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	82.441.000
6	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan manusia	86.075.200
XIV	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	
1	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	69.295.200
2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen	59.595.000

	Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	
3	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0
4	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	102.451.000
5	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	23.659.000
6	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	25.333.000
XV	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
1	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	184.908.000
2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	15.954.000
3	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur	108.677.000
XVI	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	
1	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	59.193.000
XVII	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
1	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	63.564.000
XIII	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	
1	Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	98.338.600
2	Fasilitas Hak dan kekayaan	68.919.800

Secara rinci nama program/kegiatan, indikator kinerja, capaian target dan kebutuhan dana/pagu indikatif Tahun 2025 serta perkiraan maju Tahun 2026 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkaltur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dapat dilihat pada table 4.2 berikut :

BAB V

PENUTUP

Rencana kerja Perubahan (Renja Perubahan) Bappeda-Litbang Tahun 2025 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana kerja Perubahan yang disusun Bappeda-Litbang merupakan pedoman dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan kepada para pemangku kepentingan.

Terwujudnya perencanaan pembangunan kabupaten Bengkulu Selatan yang terarah, terpadu, komprehensif dan berkesinambungan perlu didukung oleh:

1. Komitmen dari pemerintah daerah untuk merealisasikan revitalisasi lembaga perencana pembangunan daerah guna mendukung keberadaan Bappeda-Litbang yang profesional.
2. Terselenggaranya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan perencanaan pembangunan daerah.

Rencana strategis sebagai pedoman pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sesuai tugas pokok dan fungsi Bappeda –Litbang terutama pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja pada periode berikutnya. Hal ini penting untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan menjadi acuan penyusunan rencana kerja setelah Renstra berakhir.

Dalam kaitan tersebut, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan dalam mengawal implementasi Renstra Bappeda-Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 yang diterjemahkan dalam Renja Perubahan Bappeda-Litbang 2025 meliputi:

1. Setiap elemen dalam lingkup Bappeda-Litbang berkewajiban untuk mewujudkan visi dan misi yang ditetapkan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan dengan sebaik-baiknya.
2. Renstra Bappeda-Litbang 2021-2026 menjadi pedoman setiap bidang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang menjabarkan lebih lanjut visi, misi dan agenda serta berbagai strategi, kebijakan, program dan kegiatan secara terukur, terarah dan dapat dilaksanakan pada tahapan rencana tahunan, termasuk secara kreatif dan inovatif mendesain program-program terobosan dan prioritas sebagai upaya percepatan mengejar pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Manna, 26 Juni 2025
Kepala Bappeda-Litbang
Kabupaten Bengkulu Selatan

Fikri Aljaufary, S.STP., M.M.
NIP 198210012001121002

LAMPIRAN





PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
(BAPPEDA-LITBANG)

[L. Affan Bachsin, Telp/Fax. (0739) 21475]

Website : bappeda.bengkuluselatankab.go.id, email : bappeda@bengkuluselatankab.go.id, Manna

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA LITBANG
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
TAHUN 2024 - 2026

KEPALA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan kertas Kerja Evaluasi AKIP Perangkat Daerah tahun 2023 dan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, perlu menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu ditetapkan indikator kinerja utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Bappeda Litbang tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 - 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 03 tahun 2023 tentang Penetapan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023 Nomor 03);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Tahun 2022-2026.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manna

Pada tanggal 16 Mei 2024



Kepala Bappeda Litbang
Kabupaten Bengkulu Selatan

FIRRI ALGAUTARY, S.STP. MM
NIPU 19871001 200112 1 002

INDIKATOR KINERJA UTAMA
ESELON II (KEPALA PERANGKAT DAERAH)

NO	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran	Penjelasan/Formula Penghitungan	Baseline 2023	Target Kinerja			Sumber Data	Penanggung Jawab
							2024	2025	2026		
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas	Persentase Sinergi Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah	Jumlah total Nilai dari Komponen Penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah $\frac{\sum \text{Nilai Komponen Sinergi Indeks PPD}}{\text{Bobot Nilai Komponen Sinergi Indeks PPD}} \times 100$	82,92	85,00	90,00	92,00	Laporan Kinerja Tahunan Bappeda Litbang	Kepala Bappeda Litbang
						77,25%	80,00%	85,00%	90,00%	Laporan Kinerja Tahunan Bappeda Litbang	Kepala Bappeda Litbang
				Persentase Kualitas Perencanaan	$\frac{\sum \text{Nilai Komponen Kualitas Perencanaan Indeks PPD}}{\text{Bobot Nilai Komponen Kualitas Perencanaan Indeks PPD}} \times 100$	83,10%	85,00%	87,00%	90,00%	Laporan Kinerja Tahunan Bappeda Litbang	Kepala Bappeda Litbang
				Persentase Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja	$\frac{\sum \text{Nilai Komponen Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja Indeks PPD}}{\text{Bobot Nilai Komponen Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja Indeks PPD}} \times 100$	100%	100%	100%	100%	Laporan Kinerja Tahunan Bappeda Litbang	Kepala Bappeda Litbang
2	Meningkatnya kualitas Hasil Kelitbangan	Persentase nilai kematangan inovasi daerah	Meningkatnya capaian kapasitas Inovasi Daerah	Indeks inovasi daerah	$\frac{\sum \text{Inovasi yang Nilai Kematangan} > 60}{\sum \text{Inovasi yang di sampaikan Perangkat Daerah}} \times 100$ Hasil penilaian indeks inovasi oleh Kemendagri	67,64%	70,00%	72,00%	75,00%	Laporan Inovasi Bidang Litbang	Kepala Bappeda Litbang
						51,45	60,01	65,01	70,01	Kemendagri	Kepala Bappeda Litbang



INDIKATOR KINERJA UTAMA
ESELON III (SEKRETARIS DAN KEPALA BIDANG)

SEKRETARIS

NO	Program dan Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Penjelasan/ Formulasi Penghitungan	Satuan	Baseline 2023	Target Kinerja			Sumber Data	Penanggung Jawab
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Penilaian AKIP dari Inspektorat	Nilai	62,05	2024	2025	2026	LHE AKIP	Sekretariat Bappeda Litbang
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Optimalnya ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	$\frac{\Sigma \text{Dokumen perencanaan yang tersedia}}{\Sigma \text{Dokumen perencanaan yang ditargetkan}} \times 100$	Persentase	100	100	100	100	Laporan Tahunan Bappeda Litbang	Sekretariat Bappeda Litbang
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Optimalnya ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	$\frac{\Sigma \text{Administrasi Keuangan yang tersedia}}{\Sigma \text{Administrasi Keuangan yang ditargetkan}} \times 100$	Persentase	100	100	100	100	Laporan Tahunan Bappeda Litbang	Sekretariat Bappeda Litbang
3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Optimalnya ketersediaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	$\frac{\Sigma \text{Administrasi BMD yang tersedia}}{\Sigma \text{Administrasi BMD yang ditargetkan}} \times 100$	Persentase	100	100	100	100	Laporan Tahunan Bappeda Litbang	Sekretariat Bappeda Litbang
4	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Optimalnya ketersediaan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	$\frac{\Sigma \text{Administrasi Kepegawalan yang tersedia}}{\Sigma \text{Adm. Kepegawalan yang ditargetkan}} \times 100$	Persentase	100	100	100	100	Laporan Tahunan Bappeda Litbang	Sekretariat Bappeda Litbang
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Optimalnya ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	$\frac{\Sigma \text{Administrasi Umum yang tersedia}}{\Sigma \text{Administrasi Umum yang ditargetkan}} \times 100$	Persentase	100	100	100	100	Laporan Tahunan Bappeda Litbang	Sekretariat Bappeda Litbang
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalnya Pengadaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	$\frac{\Sigma \text{Pengadaan BMD yang tersedia}}{\Sigma \text{Pengadaan BMD yang ditargetkan}} \times 100$	Persentase	100	100	100	100	Laporan Tahunan Bappeda Litbang	Sekretariat Bappeda Litbang
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	$\frac{\Sigma \text{Jasa Penunjang yang tersedia}}{\Sigma \text{Jasa Penunjang yang ditargetkan}} \times 100$	Persentase	100	100	100	100	Laporan Tahunan Bappeda Litbang	Sekretariat Bappeda Litbang
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalnya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	$\frac{\Sigma \text{BMD yang dipelihara}}{\Sigma \text{BMD yang ditargetkan untuk dipelihara}} \times 100$	Persentase	100	100	100	100	Laporan Tahunan Bappeda Litbang	Sekretariat Bappeda Litbang

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
ESELON III KEPALA BIDANG PE2PD**

NO	Program dan Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Penjelasan/ Formulasi Penghitungan	Satuan (Nilai)	Baseline 2023	Target Kinerja		Sumber Data	Penanggung Jawab
							2024	2025		
A	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Kinerja	Nilai Perencanaan Kinerja	Hasil Penilaian Komponen SAKIP dari Kemenpan RB	Angka (Nilai)	21,68	23,00	25,00	Kemenpan RB	Kabid P2EPD
	1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	Nilai Rata hasil Perhitungan tingkat Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan Bengkulu Selatan (Σ Program RKPD Tahun N / Σ Program RPJMD dan Σ Pendanaan RKPD tahun n / Σ Pendanaan RPJMD)	Persentase	91,66	93,00	95,00	Laporan Kinerja Bidang P2EPD	Kabid P2EPD
2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Updating Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	$\frac{\Sigma \text{Data Perencanaan yang Update pada sipd}}{\Sigma \text{Data bidang Perencanaan Pembangunan}} \times 100$	Persentase	75,00	80,00	90,00	Laporan Kinerja Bidang P2EPD	Kabid P2EPD
		Meningkatnya Kualitas Pengukuran Kinerja	Nilai Pengukuran Kinerja	Hasil Penilaian Komponen SAKIP dari Kemenpan RB	Angka (Nilai)	15,46	20,00	23,00	Kemenpan RB	Kabid P2EPD
3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pencapaian Indikator Kinerja Daerah	$\frac{\Sigma \text{Indikator Kinerja Daerah yang tercapai target}}{\Sigma \text{Indikator Kinerja Daerah}} \times 100$	Persentase	50,00	54,54	59,09	Laporan Rakorbang	Kabid P2EPD
	4	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase Implementasi SIPD di Bidang Pembangunan Daerah	$\frac{\Sigma \text{OPD yang mengimplementasikan sipd}}{\Sigma \text{OPD di kabupaten Bengkulu Selatan}} \times 100$	Persentase	100	100	100	Laporan Kinerja Bidang P2EPD	Kabid P2EPD

INDIKATOR KINERJA UTAMA
ESELON III (KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA)

NO	Program dan Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Penjelasan/ Formulasi Penghitungan	Satuan	Baseline 2023	Target Kinerja			Sumber Data	Penanggung Jawab
							2024	2025	2026		
A	Program kordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai Kualitas Perencanaan	Jumlah Nilai Kualitas Perencanaan pada Instrumen Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah	Nilai	48,2	50,00	51,00	52,00	Laporan Kinerja Bidang PPM	Bidang PPM
	1 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Optimalisasi kesesuaian Program/Kegiatan/Sub kegiatan pada DokRen (RPJMD-RKPD, Renstra-Renja, Renja-RKA) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Konsistensi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Nilai Rata hasil Perhitungan tingkat Konsistensi Perencanaan Pembangunan Bengkulu Selatan $\left(\frac{\sum \text{Program RKPD Tahun } n}{\sum \text{Program RPJMD, } \sum \text{Kegiatan Renja tahun } n} \right) / \sum \text{Kegiatan Renstra dan } \sum \text{Sub Kegiatan RKA tahun } n / \sum \text{Sub Kegiatan Renja tahun } n$	Persentase	89,00%	89,30%	89,50%	90,00%	Laporan Kinerja Bidang PPM	Bidang PPM

INDIKATOR KINERJA UTAMA
ESELON III KEPALA BIDANG PSI

MD	Program dan Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Penjelasan/ Formulasi Penghitungan	Satuan	Baseline 2023	Target Kinerja			Sumber Data	Penanggung Jawab
							2024	2025	2026		
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai Kualitas Perencanaan	Jumlah Nilai Kualitas Perencanaan pada Instrumen Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah	Nilai	48,2	50,00	51,00	52,00	Laporan Kinerja Bidang PSI	Bidang PSI Bappeda - Litbang
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Optimalisasi kesesuaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan pada DokRen (RPJMD-RKPD, Renstra-Renja, Renja-RKA) Bidang Perencanaan dan SDA	Persentase Konsistensi Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan pada Dokumen Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA	Nilai Rata hasil Perhitungan tingkat Konsistensi Perencanaan Pembangunan Bengkulu Selatan $(\Sigma \text{ Program RKPD Tahun } N / \Sigma \text{ Program RPJMD, } \Sigma \text{ Kegiatan Renja tahun } n / \Sigma \text{ Kegiatan Renstra dan } \Sigma \text{ Sub Kegiatan RKA tahun } n / \Sigma \text{ Sub Kegiatan Renja tahun } n)$	Persentase	85,00%	86,04%	87,15%	88,40%	Laporan Kinerja Bidang PSI	Bidang PSI Bappeda - Litbang
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur	Optimalisasi kesesuaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan pada DokRen (RPJMD-RKPD, Renstra-Renja, Renja-RKA) Bidang Infrastruktur	Persentase Konsistensi Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan pada Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur	Nilai Rata hasil Perhitungan tingkat Konsistensi Perencanaan Pembangunan Bengkulu Selatan $(\Sigma \text{ Program RKPD Tahun } N / \Sigma \text{ Program RPJMD, } \Sigma \text{ Kegiatan Renja tahun } n / \Sigma \text{ Kegiatan Renstra dan } \Sigma \text{ Sub Kegiatan RKA tahun } n / \Sigma \text{ Sub Kegiatan Renja tahun } n)$	Persentase	92,60%	93,00%	93,85%	94,00%	Laporan Kinerja Bidang PSI	Bidang PSI Bappeda - Litbang

INDIKATOR KINERJA UTAMA
ESELON III KEPALA BIDANG LITBANG

NO	Program dan Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Penjelasan/ Formulasi Penghitungan	Satuan	Baseline 2023	Target Kinerja			Sumber Data	Penanggung Jawab
							2024	2025	2026		
1	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan	Persentase Penelitian yang Dimanfaatkan untuk Perumusan Kebijakan Pembangunan	$\frac{\sum \text{Inovasi yang dimanfaatkan dalam Perencanaan Pembangunan} \times 100}{\sum \text{Inovasi yang ditetapkan dalam 1 Tahun}}$	Persentase	47,05%	47,25%	47,45%	47,65%	Laporan Inovasi Bidang Litbang	Bidang Litbang
	Pengendalian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Penelitian Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dikembangkan	$\frac{\text{Persentase Konsistensi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan} \times 100}{\sum \text{Penelitian Bidang PPP yang dikembangkan}}$	Persentase	5%	7,00%	10,00%	12,00%	Kemendagri	Bidang Litbang
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Meningkatnya Kualitas Penelitian & Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Penelitian Bidang Sosial dan Kependudukan yang dikembangkan	$\frac{\sum \text{Penelitian Bidang Sosial yang dikembangkan}}{\sum \text{Penelitian Bidang Sosial dan Kependudukan}} \times 100$	Persentase	5%	10%	15%	20%	Laporan Kinerja Bidang Litbang	Bidang Litbang
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Penelitian Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang dikembangkan	$\frac{\sum \text{Penelitian Bidang Ekobang yang dikembangkan}}{\sum \text{Penelitian Bidang Ekonomi dan Pembangunan}} \times 100$	Persentase	5%	8,00%	10,00%	12,00%	Laporan Kinerja Bidang Litbang	Bidang Litbang
		Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan	Persentase Peningkatan Indeks Inovasi Daerah	$\frac{\text{Capaian IGA tahun n} - \text{capaian IGA tahun lalu}}{\text{Capaian IGA tahun lalu}} \times 100$	Persentase	36,29%	1,00%	1,50%	2,00%	Laporan Inovasi Bidang Litbang	Bidang Litbang
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Meningkatnya Inovasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Pertumbuhan Inovasi setiap tahun	$\frac{\text{Jumlah Inovasi tahun n} - \text{Jumlah Inovasi tahun lalu}}{\text{Jumlah Inovasi tahun lalu}} \times 100$	Persentase	47,82%	17,65%	18,00%	18,10%	Laporan Inovasi Bidang Litbang	Bidang Litbang

INDIKATOR KINERJA UTAMA
ESELON IV (ESELON IV)

KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN LAPORAN (SEKRETARIAT)

NO	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	Target Kinerja			Sumber Data	Penanggung Jawab
						2024	2025	2026		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	5	5	5	Sekretariat Bappeda Litbang	Sekretariat Bappeda Litbang
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	1	1	Sekretariat Bappeda Litbang	Sekretariat Bappeda Litbang
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	1	1	Sekretariat Bappeda Litbang	Sekretariat Bappeda Litbang
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen DPA-SKPD	Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1	1	1	1	Sekretariat Bappeda Litbang	Sekretariat Bappeda Litbang
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1	1	1	1	Sekretariat Bappeda Litbang	Sekretariat Bappeda Litbang
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	1	1	Sekretariat Bappeda Litbang	Sekretariat Bappeda Litbang
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan kinerja instansi pemerintah, laporan penyelenggaraan perangkat daerah, dan laporan tahunan	Dokumen LAKIP, LPPD dan Laporan Tahunan	Laporan	5	5	9	9	Sekretariat Bappeda Litbang	Sekretariat Bappeda Litbang

KPALA SUBBAGIAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH (SEKRETARIAT)

NO	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	Target Kinerja			Sumber Data	Penanggung Jawab
						2024	2025	2026		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Kali	672	672	672	672	Sekretaris Bappeda Litbang	Sekretaris Bappeda Litbang
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	12	12	Sekretariat Bappeda Litbang	Sekretariat Bappeda Litbang
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	44	44	44	44	Sekretariat Bappeda Litbang	Sekretariat Bappeda Litbang
4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	1	1	1	Sekretariat Bappeda Litbang	Sekretariat Bappeda Litbang
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	1	1	Sekretariat Bappeda Litbang	Sekretariat Bappeda Litbang
6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	1	1	1	1	Sekretariat Bappeda Litbang	Sekretariat Bappeda Litbang
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	4	4	4	4	Sekretariat Bappeda Litbang	Sekretariat Bappeda Litbang

8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	1	1	1	Sekretariat Bappeda Litbang
9	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Unit	24	24	24	24	Sekretariat Bappeda Litbang
10	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	1	1	Sekretariat Bappeda Litbang
11	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1	1	1	1	Sekretariat Bappeda Litbang
12	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	1	1	Sekretariat Bappeda Litbang
13	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	1	1	Sekretariat Bappeda Litbang
14	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	5	5	5	5	Sekretariat Bappeda Litbang
15	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	1	1	Sekretariat Bappeda Litbang

KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN (SEKRETARIAT)

NO	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	Target Kinerja			Sumber Data	Penanggung Jawab
						2024	2025	2026		
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Orang	44	44	44	44	Sekretariat Bappeda Litbang	Sekretariat Bappeda Litbang
2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	44	44	44	44	Sekretariat Bappeda Litbang	Sekretariat Bappeda Litbang
3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	12	12	12	Sekretariat Bappeda Litbang	Sekretariat Bappeda Litbang
4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	1	1	Sekretariat Bappeda Litbang	Sekretariat Bappeda Litbang
5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	1	1	1	Sekretariat Bappeda Litbang	Sekretariat Bappeda Litbang
6	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Orang	0	1	0	0	Sekretariat Bappeda Litbang	Sekretariat Bappeda Litbang
7	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Orang	0	0	0	0	Sekretariat Bappeda Litbang	Sekretariat Bappeda Litbang
8	Pemindahan Tugas ASN	Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	Orang	0	0	0	0	Sekretariat Bappeda Litbang	Sekretariat Bappeda Litbang
9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10	10	10	10	Sekretariat Bappeda Litbang	Sekretariat Bappeda Litbang

10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	44	44	44	44	44	Sekretariat Bappeda Litbang
11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	44	44	44	44	44	Sekretariat Bappeda Litbang
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	11	11	11	11	11	Sekretariat Bappeda Litbang
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	13	13	13	13	13	Sekretariat Bappeda Litbang
14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	10	10	10	10	10	Sekretariat Bappeda Litbang
15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	65	65	65	65	65	Sekretariat Bappeda Litbang
16	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	10	10	10	12	12	Sekretariat Bappeda Litbang
17	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	6600	6600	6600	8000	8000	Sekretariat Bappeda Litbang
18	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	5	5	5	5	5	Sekretariat Bappeda Litbang
19	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	1	1	1	Sekretariat Bappeda Litbang
20	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	255	255	255	255	255	Sekretariat Bappeda Litbang

21	Pentaausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	1	1	1	Sekretariat Bappeda Litbang
22	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	1	1	1	1	Sekretariat Bappeda Litbang
23	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	8	4	1	1	1	Sekretariat Bappeda Litbang
24	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	1	1	1	1	Sekretariat Bappeda Litbang
25	Pengadaan Alat Besar	Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	Sekretariat Bappeda Litbang
26	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Unit	1	1	1	1	1	Sekretariat Bappeda Litbang
27	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	1	Sekretariat Bappeda Litbang
28	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	1	1	1	Sekretariat Bappeda Litbang
29	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	1	1	1	Sekretariat Bappeda Litbang
30	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	1	1	1	1	1	Sekretariat Bappeda Litbang
31	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	Sekretariat Bappeda Litbang
32	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	11	11	10	10	10	Sekretariat Bappeda Litbang

33	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	1	1	1	1	1	1	Sekretariat Bappeda Litbang
34	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	1	1	1	1	Sekretariat Bappeda Litbang
35	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	12	12	Sekretariat Bappeda Litbang
36	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	1	1	1	1	Sekretariat Bappeda Litbang
37	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	1	1	1	1	Sekretariat Bappeda Litbang
38	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	23	23	25	25	25	25	Sekretariat Bappeda Litbang
39	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	1	1	1	1	1	Sekretariat Bappeda Litbang
40	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit	1	1	1	1	1	1	Sekretariat Bappeda Litbang

41	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	1	1	1	1	1	Sekretariat Bappeda Litbang
42	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	1	1	1	1	Sekretariat Bappeda Litbang
43	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	1	1	1	1	Sekretariat Bappeda Litbang
44	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	1	1	1	1	Sekretariat Bappeda Litbang
45	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	1	1	1	1	1	Sekretariat Bappeda Litbang
46	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi	Unit	2	2	2	2	2	Sekretariat Bappeda Litbang
47	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi	Unit	52	52	60	60	60	Sekretariat Bappeda Litbang
48	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi	Unit	5	5	5	5	5	Sekretariat Bappeda Litbang
49	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	m ²	0	0	0	0	0	Sekretariat Bappeda Litbang

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
ESELON IV (ESELON IV) DISETARAKAN**

Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

NO	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	Target Kinerja			Sumber Data	Penanggung Jawab
						2024	2025	2026		
1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Tersedianya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen	1	1	1	1	Bidang P2EPD	Bidang P2EPD
2	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan	Sinkronnya Dokumen Perencanaan	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	1	1	1	1	Bidang P2EPD	Bidang P2EPD
3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Terlaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	1	1	1	1	Bidang P2EPD	Bidang P2EPD
4	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	1	1	1	1	Bidang P2EPD	Bidang P2EPD
5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Terlaksananya Konsultasi Publik	Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	1	1	1	1	Bidang P2EPD	Bidang P2EPD
6	Penyusunan bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Tersedianya Usulan-Usulan yang telah Terverifikasi oleh Kecamatan	Jumlah Usulan yang terverifikasi oleh kecamatan	Usulan	220	242	275	300	Bidang P2EPD	Bidang P2EPD
7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJM/RKPD)	Dokumen	3	3	3	2	Bidang P2EPD	Bidang P2EPD

Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	Target Kinerja			Sumber Data	Penanggung Jawab
						2024	2025	2026		
1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan pembangunan Daerah)	Masukan	20	20	20	20	P2EPD	P2EPD
2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Terbinanya Sumber Daya Manusia OPD dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang	200	200	250	250	P2EPD	P2EPD
3	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang	Buku	1	1	1	1	P2EPD	P2EPD

Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	Target Kinerja			Sumber Data	Penanggung Jawab
						2024	2025	2026		
1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	4	4	4	4	P2EPD	P2EPD
2	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Terkendalinya Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	Kerja Sama	-	-	-	-	P2EPD	P2EPD
3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	3	1	1	1	P2EPD	P2EPD

Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Pembangunan Daerah

NO	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	Target Kinerja			Sumber Data	Penanggung Jawab
						2024	2025	2026		
1	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang dikelola	Dokumen	1	1	1	1	P2EPD	P2EPD
2	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Terlaksananya Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Dokumen	1	1	1	1	P2EPD	P2EPD
3	Pembinaan Sistem Infotnasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Kabupaten	Terlaksananya Pembinaan Sistem Infotnasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Kabupaten	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Infotnasi Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Kabupaten	Dokumen	1	1	1	1	P2EPD	P2EPD

INDIKATOR KINERJA UTAMA
ESELON IV (ESELON IV) DISETARAKAN

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

NO	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	Target Kinerja			Sumber Data	Petanggung Jawab
						2024	2025	2026		
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	1	1	1	Bidang PPM	Bidang PPM
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	16	16	24	16	Bidang PPM	Bidang PPM
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	1	1	1	1	Bidang PPM	Bidang PPM
4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	1	1	1	1	Bidang PPM	Bidang PPM
5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	4	4	5	5	Bidang PPM	Bidang PPM
6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	18	18	37	18	Bidang PPM	Bidang PPM
7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	46	46	69	46	Bidang PPM	Bidang PPM
8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	6	6	6	6	Bidang PPM	Bidang PPM

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
ESELON IV (ESELON DISETARAKAN)**

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA

NO	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	Target Kinerja			Sumber Data	Penanggung Jawab
						2024	2025	2026		
1.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD & RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2	2	2	2	Bidang PSI	Bidang PSI
2.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	10	10	15	10	Bidang PSI	Bidang PSI
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	8	8	8	8	Bidang PSI	Bidang PSI
4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	1	1	1	1	Bidang PSI	Bidang PSI
5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	6	5	1	Bidang PSI	Bidang PSI
6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Perangkat Daerah	8	8	8	8	Bidang PSI	Bidang PSI

7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Perangkat Daerah	8	8	8	8	Bidang PSI	Bidang PSI
8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	1	1	1	1	Bidang PSI	Bidang PSI

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur

No	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	Target Kinerja			Sumber Data	Penanggung Jawab
						2024	2025	2026		
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	3	3	3	3	Bidang PSI	Bidang PSI
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	8	8	8	8	Bidang PSI	Bidang PSI
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	8	8	8	8	Bidang PSI	Bidang PSI
4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	3	3	3	3	Bidang PSI	Bidang PSI

INDIKATOR KINERJA UTAMA
ESELON IV (ESELON IV) DISETARAKAN

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

NO	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	Target Kinerja			Sumber Data	Penanggung Jawab
						2024	2025	2026		
1	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Laporan	1	1	1	1	Bidang Litbang	Bidang Litbang
2	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Laporan	1	1	1	1	Bidang Litbang	Bidang Litbang
3	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Laporan	1	1	1	1	Bidang Litbang	Bidang Litbang
4	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Laporan	1	1	1	1	Bidang Litbang	Bidang Litbang
5	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Dokumen	1	1	1	1	Bidang Litbang	Bidang Litbang
6	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Dokumen	1	1	1	1	Bidang Litbang	Bidang Litbang
7	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Laporan	1	1	1	1	Bidang Litbang	Bidang Litbang

8	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Laporan	1	1	1	1	Bidang Litbang
9	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Jumlah laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Laporan	1	1	1	1	Bidang Litbang
10	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	Laporan	1	1	1	1	Bidang Litbang
11	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Laporan	1	1	1	1	Bidang Litbang
12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Terkelolanya Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Dokumen	1	1	1	1	Bidang Litbang
13	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Terlaksananya Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	Laporan	1	1	1	1	Bidang Litbang
14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Terlaksananya Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Laporan	1	1	1	1	Bidang Litbang
15	Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	Terlaksananya Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	Laporan	1	1	1	1	Bidang Litbang

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan

NO	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	Target Kinerja			Sumber Data	Penanggung Jawab
						2024	2025	2026		
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen	1	1	1	1	Bidang Litbang	Bidang Litbang
2	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dokumen	1	1	1	1	Bidang Litbang	Bidang Litbang
3	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Dokumen	1	1	1	1	Bidang Litbang	Bidang Litbang
4	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Dokumen	1	1	1	1	Bidang Litbang	Bidang Litbang
5	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Dokumen	1	1	1	1		
6	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Dokumen	1	1	1	1		
7	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dokumen	1	1	1	1	Bidang Litbang	Bidang Litbang
8	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dokumen	1	1	1	1	Bidang Litbang	Bidang Litbang
9	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Dokumen	1	1	1	1	Bidang Litbang	Bidang Litbang
10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Dokumen	1	1	1	1	Bidang Litbang	Bidang Litbang
11	Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	Dokumen	1	1	1	1	Bidang Litbang	Bidang Litbang

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

NO	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	Target Kinerja			Sumber Data	Penanggung Jawab
						2024	2025	2026		
1	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dokumen	1	1	1	1	Bidang Litbang	Bidang Litbang
2	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen	1	1	1	1	Bidang Litbang	Bidang Litbang
3	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Dokumen	1	1	1	1	Bidang Litbang	Bidang Litbang
4	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Dokumen	1	1	1	1	Bidang Litbang	Bidang Litbang
5	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Dokumen	1	1	1	1	Bidang Litbang	Bidang Litbang
6	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Dokumen	1	1	1	1	Bidang Litbang	Bidang Litbang
7	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Dokumen	1	1	1	1	Bidang Litbang	Bidang Litbang
8	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Dokumen	1	1	1	1	Bidang Litbang	Bidang Litbang
9	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Dokumen	1	1	1	1	Bidang Litbang	Bidang Litbang
10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Dokumen	1	1	1	1	Bidang Litbang	Bidang Litbang
11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	1	1	1	1	Bidang Litbang	Bidang Litbang
12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanian	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanian	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanian	Dokumen	1	1	1	1	Bidang Litbang	Bidang Litbang

13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Dokumen	1	1	1	1	1	Bidang Litbang	Bidang Litbang
----	--	--	---	---------	---	---	---	---	---	----------------	----------------

Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi

NO	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	Target Kinerja			Sumber Data	Penanggung Jawab
						2024	2025	2026		
1	Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	1	1	1	1	Bidang Litbang	Bidang Litbang
2	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Terlaksananya Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Laporan	1	1	1	1	Bidang Litbang	Bidang Litbang
3	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan	1	1	1	1	Bidang Litbang	Bidang Litbang
4	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Laporan	1	1	1	1	Bidang Litbang	Bidang Litbang
5	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Terlaksananya Fasilitasi Hak Kekayaan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Laporan	n/a	1	2	4	Bidang Litbang	Bidang Litbang